

**PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DIAJENG ARIANTI PUSPANINGTYAS
NPM. 0771010139

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)

Disusun Oleh :

DIAJENG ARIANTI PUSPANINGTYAS

NPM. 0771010139

Telah disetujui mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

H. SUTRISNO,SH.,M.Hum.

NIP. 196201212 198803 1001

MAS ANIENDA TF,SH., MH

NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO,SH.,MM

NIP. 19620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)

Oleh :

DIAJENG ARIANTI PUSPANINGTYAS

NPM. 0771010139

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 20 April 2011

Tim Penguji

1. **H. SUTRISNO, SH.,M.Hum** (.....)
NIP. 19601212 198803 1001
2. **HARIYO SULISTYANTORO,SH., MM** (.....)
NIP. 19620625 199103 1001
3. **SUBANI, SH., M.Si.** (.....)
NIP. 19510504 198303

**Mengetahui,
DEKAN**

HARIYO SULISTYANTORO,SH., MM
NIP. 19620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)

Oleh :

DIAJENG ARIANTI PUSPANINGTYAS

NPM. 0771010139

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 20 April 2011

Tim Penguji

1. **H. SUTRISNO, SH.,M.Hum** (.....)
NIP. 19601212 198803 1001
2. **HARIYO SULISTYANTORO,SH., MM** (.....)
NIP. 19620625 199103 1001
3. **SUBANI, SH., M.Si.** (.....)
NIP. 19510504 198303

**Mengetahui,
DEKAN**

HARIYO SULISTYANTORO,SH., MM
NIP. 19620625 199103 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diajeng Arianti Puspaningtyas
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/09 Agustus 1989
 NPM : 0771010139
 Konsentrasi : Pidana
 Alamat : Delta Sari Baru, Delta Avia No 59 Waru-Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
 KaProdi

Surabaya, 20 April 2011
 Penulis,

Subani,SH., Msi
 NIP. 19510504 198303

Diajeng Arianti Puspaningtyas
 NPM. 0771010139

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk
BUNDA tercinta
Engkaulah Kartini yang Ananda temui di dunia
Dengan semangat seorang diri
Kau jadikan kami (anak-anakmu)
Orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Negara
Terimakasih KARTINIKU...*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas kemurahanNya telah memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (*Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo*)”

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh masukan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat dari pelbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro,SH., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.
2. Bapak Abdul Hani, Bc. IP,SH, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo.
3. Bapak Agus Dwi Hartanto, Bc.IP, SH, selaku Kepala Harian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan tentang Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Bapak Hendra, Bc.IP,SH disela-sela kesibukannya masih berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi
5. Bapak Sutrisno, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim
7. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.
8. Ibu Mas Anienda TF.SH.,MH selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.
9. Bapak Eko Wahyudi, SH selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum tercinta ini.
10. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jatim yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu.
12. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim beserta staf yang telah memberi pelayanan pengurusan administrasi.

13. Untuk Papa tercinta (Alm.Sonny) Ananda yakin doa dan restu itu tetap ada untuk Ananda karena sekarang Papa lebih dekat dengan-Nya. Meskipun Papa tidak pernah menyaksikan Ananda tapi Ananda yakin Papa selalu ada di dekat Ananda.
14. Mama tercinta yang telah memberikan restu dan doa disetiap langkah Ananda, serta dorongan moril maupun materiil yang begitu banyak.
15. Kakak-kakak Penulis yang dengan setia dan penuh kesabaran membimbing penulis dari awal hingga akhir pendidikan
16. Untuk calon pendamping hidup , Gatra Dwi Arista yang telah banyak memberikan masukan, serta semangat ditengah kejenuhan penulis.
17. Sahabat-sahabat penulis, Stela, Permana, Yazid, Hengki, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan keterbatasannya pengetahuan yang penulis miliki.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, April 2011

Diajeng Arianti Puspaningtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKIRPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
a. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika.....	6
1). Pengertian Narkotika.....	6
2). Pengertian Psikotropika.....	7
3) Pengertian Zat Adiktif.....	7

4). Jenis-Jenis Narkotika.....	7
b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk- Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	9
1). Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	9
2). Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	9
3). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	11
1. Faktor Internal Pelaku.....	11
2. Faktor Eksternal Pelaku.....	12
c. Lembaga Pemasyarakatan.....	15
d. Pembinaan Narapidana.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	23
a. Pendekatan Masalah.....	23
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	23
a. Bahan Hukum Primer.....	24
b. Bahan Hukum Sekunder.....	24
c. Bahan Hukum Tertier.....	24
b. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
1. Studi Kepustakaan.....	25
2. Wawancara	25
3. Observasi	26
c. Metode Analisis Data.....	26

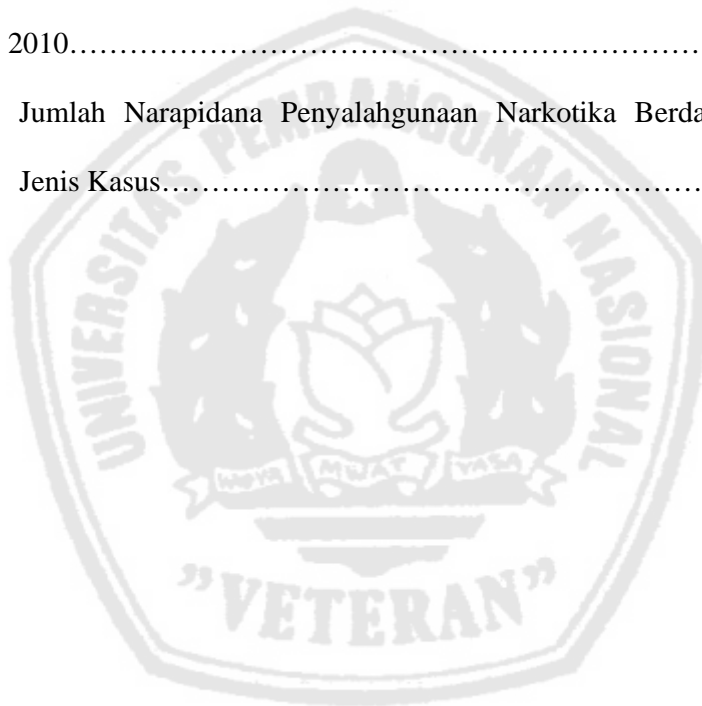
1.7. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SIDOARJO.....	29
2.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.....	29
2.1.1. Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo Dengan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo	35
2.2. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.....	37
2.2.1. Pembinaan Tahap Awal Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.....	40
2.2.2. Pembinaan Tahap Lanjutan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.....	45
BAB III HAMBATAN DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	52
3.1. Faktor Yang Menghambat Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.....	52
a. Faktor Internal.....	53
b. Faktor Eksternal.....	58
3.2. Upaya Menghadapi Kendala.....	59

BAB IV PENUTUP.....	63
a. Kesimpulan	63
b. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jadwal Kegiatan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.....	31
Tabel 2 : Data Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika Tahun 2010.....	38
Tabel 3 : Jumlah Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Jenis Kasus.....	39



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Gambar Warga Binaan Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Asimilasi.....	51



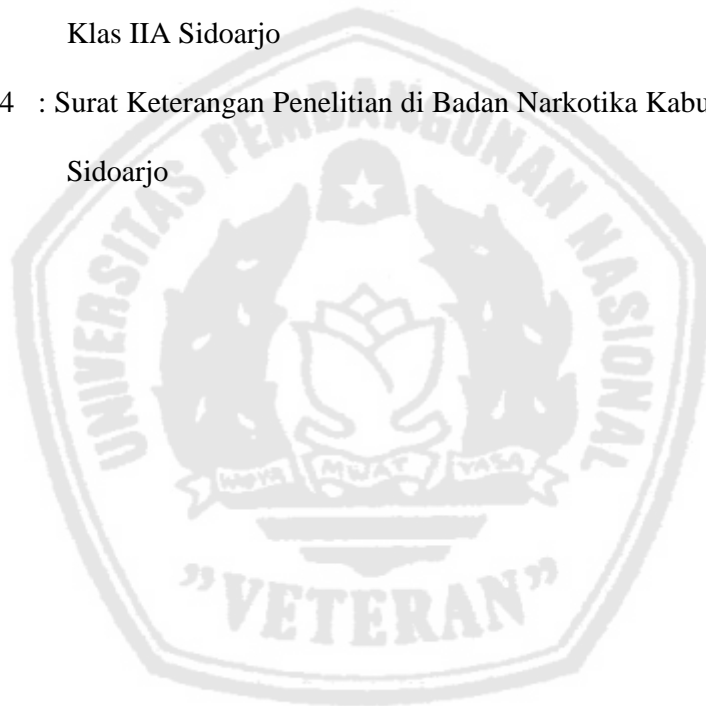
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sturktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Sidoarjo

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIA Sidoarjo

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian di Badan Narkotika Kabupaten
Sidoarjo



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Diajeng Arianti Puspaningtyas
NPM : 0771010139
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Agustus 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo)**

ABSTRAKSI

Kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Narapidana yang telah mengetahui segala sesuatunya tentang proses pengadilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan di mana mereka menjalani hukuman. Secara umum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika; Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan proses pembinaan para narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.

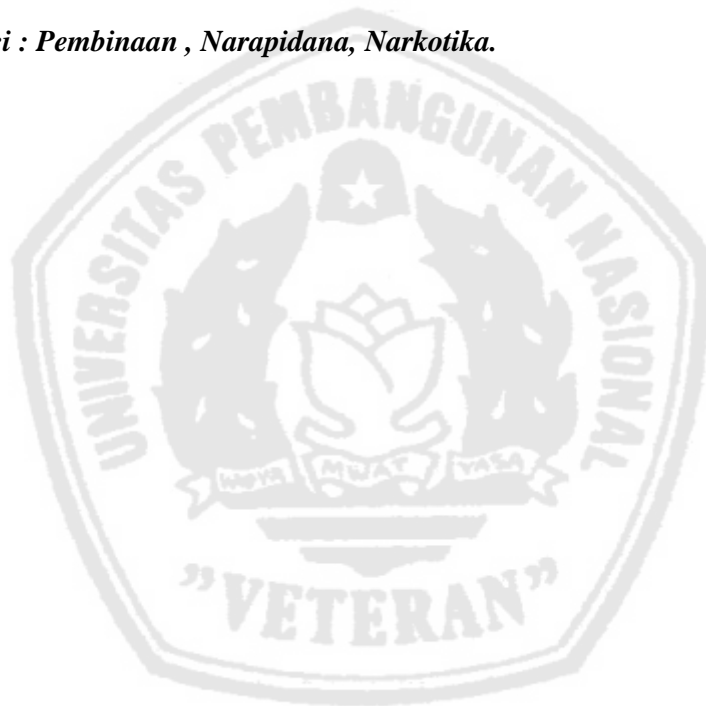
Jenis Penelitian ini adalah Yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Kepala dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, dan digunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai literatur yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan Program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas

IIA Sidoarjo merupakan sebuah program yang memadukan berbagai metode yang meliputi aspek medis, sosial, kerohanian dan ketrampilan. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih ketrampilan bagi narapidana membuat proses pembinaan kurang berjalan secara efektif. Keterbatasan SDM yang berkualitas dan benar-benar memahami pelaksanaan program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari kurangnya motivasi petugas yang mengawasi keadaan peserta rehabilitasi secara terus menerus, sehingga kegiatan dalam blok kurang dapat diamati.

Kata kunci : Pembinaan , Narapidana, Narkoba.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai

Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau

korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika

mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bepijak pada kenyataan tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai

“PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika?
- b. Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan proses pembinaan para narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dalam hal pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika maupun yang lainnya.

- b. Secara Praktis, Dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.

1.5. Kajian Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

1) Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³

¹ Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2005, h. 16

² Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Pasal 6 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Pengertian Psikotropika

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, menyebutkan pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3) Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12.

4) Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

a. Candu atau disebut juga dengan Opium

Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang

pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

f. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu

zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.⁴

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

1) Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.⁵

2) Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.

⁴ Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *op.cit.*, h.21-25

⁵ *Ibid*, h.41

b. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkoba; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- Pembunuhan;
- Pencurian;
- Penodongan
- Penjambretan;
- Pemerasan;
- Pemerkosaan;
- Penipuan;
- Pelanggaran rambu lalu lintas;
- Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

3) **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Faktor Internal Pelaku**

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

a. **Perasaan Egois**

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

b. **Kehendak Ingin Bebas**

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan

interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.⁶

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut ;

⁶ *Ibid*, h. 53-56

a. Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaannya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan

oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang

tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama

C. Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terdakwa yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam Sistem baru

pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.⁷

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai atau sudah diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

D. Pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁷ Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan.h. 33

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.⁸

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana

⁸ UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 12 Tahun 1995, karena selama masa penelitian peneliti melihat proses pembinaan secara langsung dan diperkuat dengan melakukan wawancara dengan responden yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Untuk narapidana penyalahgunaan narkotika yang masih dibawah umur di pisahkan dalam kamar khusus narapidana anak, dan apabila ancaman pidananya di atas satu tahun maka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Jawa Timur untuk mendapatkam pembinaan dan pembimbingan lebih lanjut.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.

- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.⁹

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembedaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang

⁹ Harsono, *opcit*, h.51

- mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
 - d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
 - e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
 - f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
 - g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.

- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.¹⁰

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh

¹⁰ *Ibid*, h 48-50

narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

1.6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

1) Jenis dan Tipe Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris dalam membahas permasalahan. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

2) Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terbagi lagi menjadi :

¹¹ *Ibid*, h 71

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-Undangan RI, yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b). Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan umum dan seterusnya.

c). Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

b. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan sistem pemerintahan di Indonesia serta Undang-Undang yang berhubungan dengan narkoba dan lembaga pemerintahan.

2) Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan

komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

3) Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan tahap-tahap selama proses pembinaan para narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

1.7. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal skripsi terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta pertanggung

jawaban sistematis. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Menguraikan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, Pertama mengenai Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo. Kedua, Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo yang terdiri dari dua sub sub bab yaitu pembinaan tahap awal narapidana penyalahgunaan narkotika, yang kedua pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi terpadu.

Bab III Hambatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Menguraikan tentang Hambatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pertama, Faktor Internal Yang Menghambat Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo. Kedua, mengenai

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Pembinaan.

Bab IV Penutup

Merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

